

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penulisan

Etika yang terbentuk di tanah Jepang tentu tidak dapat dipisahkan dari lahirnya filsafat dan pola pikir yang tumbuh di Jepang sejak dahulu kala. Perkembangan filsafat di Jepang tidak lepas dari peran-peran negara tetangga di Asia dan filsafat Eropa (*tetsugaku*). Dengan masuknya pengaruh-pengaruh filsafat dari negara-negara seperti Cina dan Korea, membentuk sebuah pendirian falsafah yang menjadi identitas kokoh Jepang hingga saat ini, terutama dari tiga akar terbesar di Asia Tenggara: Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme.

Menurut Thomas Kasulis (2019), terdapat lima pilar terbesar dalam filsafat Jepang, yaitu Shinto, Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, dan Bushido. Dalam hal ini memang banyak yang mengaitkan beberapa filsafat ini kepada kepercayaan dan agama, namun ada banyak falsafah-falsafah yang terbentuk dan dibawa dari kepercayaan-kepercayaan tersebut, sehingga membentuk kemasyarakatan Jepang dengan segala keindahan budayanya hingga pada saat ini.

Diawali dengan Proto-Shinto yang hadir pada abad ke-18 sejak era Yayoi (300 SM-300 M), filsafat ini masuk dengan bentuk nasionalisme dan etnosentrisme, juga berbentuk agama animisme dengan *Kami* sebagai sosok tuhan yang dipercayai. Proto-Shinto hadir dari berkumpulnya seluruh kepercayaan dan prosesi kebudayaan dari Jepang prasejarah (Earheart, 2004:2) Sebagai kepercayaan yang dapat diterjemahkan sebagai *jalan Tuhan*, Proto-Shinto membawa filsafat dan pemikiran konjungSIONAL yang dikotomis; baik/buruk, kemanusiaan/alam, hidup/mati, dan roh/kehidupan.

Menuju kepada Konfusianisme, filsafat yang dibawa oleh seorang guru bernama Konfusius (541-479 SM) dari Cina ini dapat dilihat dari banyak segi seperti tradisi, agama, dan budaya, namun Konfusianisme yang berpengaruh di Jepang kali ini akan dilihat dari segi filsafat, pemikiran dan etika yang dibawa.

Konfusianisme masuk ke Jepang setelah proto-Shinto masuk ke Jepang dan menggeser prinsipnya yang hitam-putih dalam memandang kebaikan, kejahatan,

perbuatan baik dan perbuatan buruk. Konfusianisme masuk bersamaan dengan masa di mana masyarakat Jepang mulai membentuk sistem aksara, berdasarkan aksara Cina.

Filsafat ini memang tidak membentuk sebuah sekolah filsafat dan banyak buku seperti filsafat-filsafat lainnya, dan gagal disebarkan seperti keinginan Konfusius untuk menggantikan tatanan sosial yang berlaku pada jaman tersebut, namun Konfusianisme tetap mendapat pengikut-pengikutnya sendiri dan berpengaruh besar terhadap etika Jepang. Meski tidak sesukses filsafat-filsafat lainnya, Konfusianisme terekam dari percakapan Konfusius kepada murid-muridnya dalam buku berjudul *Lunyu* (Nicolas Levi, 2013:1) dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kedua negara tetangga di Asia Timur, terutama di Jepang.

Pada masa kepemimpinan Tokugawa, Jepang mengadopsi Lima Hubungan Utama (五經, Wǔjīng) dari Konfusianisme sebagai bagian dari Gorin Gojo, yaitu pada bagian Gorin. Lima hubungan ini dipercaya oleh Konfusius sebagai kunci keharmonisan masyarakat dan keluarga.

Implementasi Konfusianisme yang terlihat memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip Konfusius mengenai pentingnya keharmonisan antar masyarakat, masyarakat dengan pemimpin, serta sesama keluarga adalah hadirnya sistem kekeluargaan Ie pada masyarakat Jepang pada era Edo, tepat setelah Tokugawa Ieayasu memerintah dan mengadopsi Neo-Konfusianisme yang dikembangkan serta disebarkan oleh murid Konfusius bernama Mencius.

Ditemukan kesamaan dalam pelaksanaan Ie dengan Lima Hubungan Utama dalam Konfusianisme. Dalam hubungan pemerintah dan masyarakat dapat dilihat dari pemerintahan Tokugawa sendiri. Dalam petuahnya, Konfusius menekankan pentingnya posisi pemimpin sebagai seorang contoh:

“But if the ruler was corrupt, how could he expect anything different from his subjects?”
(Confucius, 1983, p. 120).

Hierarki yang Tokugawa terapkan pada jaman Edo tidak seperti hierarki yang ideal bagi Konfusius. Para ahli pun berpendapat bahwa ada banyak sisi negatif dari hierarki yang Tokugawa ciptakan. Sebagai contoh, G.B Sansom dalam bukunya yang berjudul *Japan, A Short Cultural History*, menganggap bahwa Tokugawa adalah pemimpin yang

“mengerikan dan represif, sebab pada awal mula dan pertumbuhan awalnya, tidak ada apapun selain pengungkapan haus kekuasaan dari para pemimpin dalam keadaan perang”. Begitu pula dengan pendapat E.H Norman dalam bukunya yang berjudul *Japan's Emergence as a Modern State*, ia beranggapan bahwa penerapan sistem hierarki oleh Tokugawa ini merupakan “salah satu representasi dari upaya secara sadar dalam sejarah untuk membekukan masyarakat dalam cetakan hierarkis yang sulit diruntuhkan. Setiap kelas sosial, setiap bagian dari kelas sosial tersebut, memiliki peraturan mengenai pakaian, perayaan dan perilaku yang diawasi dengan sangat ketat dan diikuti dengan serangkaian rasa sakit dan hukuman”.

Keadaan di mana masyarakat era Tokugawa mulai memahami fungsi serta peran mereka masing-masing akhirnya mengubah pandangan para ahli mengenai sistem tersebut. T. C Smith dalam *A History of Japan* mengatakan bahwa “kehidupan para petani dideskripsikan sebagai kehidupan yang miskin dan malang, dan benar adanya bahwa mereka teropresi oleh kelas pemerintah, terkadang sampai di titik yang sangat kejam. Namun ada sisi lain dari penggambaran ini: seorang petani dan keluarganya mengelola lima hektar tanahnya dan hidup dalam kesederhanaan tanpa kesulitan yang begitu besar”.

Terbentuknya sistem kekeluargaan *Ie* pada masyarakat Jepang tidak terlepas pula dengan masuknya Konfusianisme ke Jepang. Menurut Tobing (2006:74), struktur keluarga *Ie* menganut sistem *daikazoku* atau keluarga besar. Yang dapat disebut sebagai anggota *Ie* terdiri dari berbagai generasi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mereka juga diikat oleh kesadaran berkeluarga yang disebut sebagai *kazoku ishiki*. Anggota keluarga *Ie* terdiri dari kakek dan nenek dari kedua pihak keluarga, seorang ayah (*kachou*), ibu, anak laki-laki pertama (*chounan*) dan anak-anak lainnya. Anggota keluarga lainnya adalah orang-orang kepercayaan dari *kachou*.

Anak-anak dalam keluarga *Ie* diwajibkan untuk tinggal bersama orang tuanya sampai mereka memiliki *Ie* sendiri, serta terkhusus bagi *chounan* wajib meneruskan semua aset keluarga, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sumber pendapatan keluarga (usaha keluarga, sawah, dan perternakan). Warisan ini tidak bisa dipindahtanggankan, namun merupakan sebuah kewajiban dan kepercayaan yang harus ditanggung secara berkelanjutan oleh ahli waris.

Tanggungannya tersebut diikuti pula dengan tingginya tanggung jawab orang tua *chounan* terhadap masa depan anaknya, yaitu dengan selalu memberi makanan yang bergizi dan pendidikan yang tinggi, agar ia bisa menjadi wajah terdepan yang dapat mengangkat derajat dan martabat keluarganya (*kamae wo ageru*) (Ota, dalam Yoshihiro, 2016:47).

Sebagai suami-istri, orang tua dalam keluarga *Ie* memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Sang suami disebut *kachou* bukan tanpa alasan, sebab seorang *kachou* bertanggungjawab untuk menjadi penentu keputusan dalam keluarganya dan mencari nafkah. Sementara sang istri bertanggungjawab untuk mengurus rumah dan merawat anak-anaknya.

Dalam hubungan kakak-beradik, anak laki-laki pertama akan menjadi *chounan* dan mewariskan harta serta tanggung jawab ayahnya meski ia memiliki kakak perempuan sekalipun (Stephen M. Lyon, 2017:12).

Karena tidak hanya diikat oleh pertalian darah dan bisa memasukkan anggota keluarga lain (*yoshi*), seorang anak kandung dari keluarga *Ie* bisa memiliki saudara angkat. Hal ini bisa terjadi jika dalam keluarga tersebut tidak terdapat anak laki-laki yang bisa mengisi posisi *chounan* dan belum ada anak perempuan yang menikah dan bersuami (Yoshihiro, 2016:47).

Sebagai adik-kakak, *chounan* wajib mendahulukan kewajibannya dibanding solidaritasnya dengan saudara-saudaranya kandungnya. Bila ada keputusan yang ditentang oleh orang tua mereka, maka seorang *chounan* harus berpihak kepada orang tua dan menindak tegas setiap keputusan yang telah diambil saudara-saudaranya dan dianggap salah atau menyimpang oleh orang tua mereka (Stephen M. Lyon, 2017:12).

Terdapat perubahan-perubahan yang mencolok jika dibandingkan dengan etika dan tatanan masyarakat Jepang pada masa sekarang. Terutama pada bagaimana masyarakat Jepang memandang pemerintahan mereka (Diet dan Perdana Menteri), memandang pernikahan dan *parenting*, serta bagaimana hubungan hierarkis horizontal antar teman, senior, serta junior mereka.

Terkait dengan hal-hal berikut, pemakalah ingin menyajikan informasi mengenai besarnya dampak dan kaitan Konfusianisme dalam pembentukan etika dalam masyarakat Jepang. Demi meninjau dan meramu makalah ini, maka disusunlah

hasil argumentasinya dalam “**Pengaruh Konfusianisme dalam Etika Masyarakat Jepang**”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan makalah yang sudah ada, maka perumusan masalah yang dapat dijabarkan adalah: Bagaimanakah pengaruh Konfusianisme dalam etika masyarakat Jepang?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah komprehensif ini adalah untuk mengetahui pengaruh filsafat Konfusianisme dalam etika masyarakat Jepang.

